

Aktivitas Public Affairs Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Terkait Pendidikan Inklusif (Studi tentang Kegiatan Humas pada Program Advokasi "Yayasan Wahana Inklusif Indonesia" periode 2019-2020) = Non-Governmental Organizations Public Affairs Activity in Supporting Government Policy of Inclusive Education (A Public Relations Activity Study of Advocacy Program at Wahana Inklusif Indonesia Foundation in 2019-2020)

Asa Sakina Tsalisa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20504540&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Hubungan Masyarakat (Humas) berperan penting dalam membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memajemen, menjembatani, dan mempertahankan hubungan yang berkaitan dengan organisasi dan tujuan-tujuannya. Subjek penelitian ini adalah Yayasan Wahana Inklusif Indonesia (WII), yakni LSM yang bergerak pada isu hak pendidikan bagi siswa disabilitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk memengaruhi dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, aktivitas dalam program advokasi WII banyak berkaitan dengan konsep public affairs yang merupakan bagian dari cabang kegiatan humas. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana aktivitas public affairs yang dilakukan oleh LSM dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, serta peran yang diembannya bagi organisasi (Driesch & Richard, 2016; Thomson & John, 2007). Aktivitas public affairs dan advokasi yang dilakukan oleh LSM WII juga akan dikaitkan dengan model public relations yang dikembangkan oleh Grunig dan Hunt (1984). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan dua informan yang merupakan bagian internal dari WII, dan satu informan yang merupakan humas dan ahli komunikasi dari LSM lain sebagai triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WII telah melakukan aktivitas public affairs dalam program advokasinya, yakni lobbying dan relasi pemerintah (government relations). Pola advokasi positif yang digunakan oleh WII sejalan dengan prinsip model two way symmetrical public relations. Model lain seperti public information dan two way asymmetrical juga digunakan tergantung pada konteks dan kebutuhannya.